

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sumantri, Sri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni.

Pitlo A, Sudikno Mertokusumo, Cetakan ke II 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.

Kusumaatmadja, Mochtar, Tanpa Tahun, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Cipta.

Kelsen Hans; 2008, *Dasar-dasar Hukum Normatif: Prinsip-Prinsip Teoritis untuk mewujudkan Keadilan dan Hukum dan Politik*, Penerjemah: Nurulita Yusron, Ujung Berung Bandung, Nusa Media.

Effendy, Marwan, Kejaksaan RI, 2005, *Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Syprinaus Aristeus, 2007, *Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris dalam Peradilan Pidana*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham RI.

Loqman, Loebby, 1990, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Eddiyono, Wahyudi, et.al, 2014, *Praperadilan di Indonesia: Sejarah dan Praktiknya*, Jakarta, Institute for criminal Justice Reform.

Pangaribuan, M.P. Luhut, 2009, *Lay Judges & Hakim Ad Hoq, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Papis Sinar Sinanti.

Harahap, M.Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Edisi Kedua), Jakarta, Sinar Grafika.

-----2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Effendi, Tolib 2014, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia, Malang,Setara Press.
- Hiariej, Eddy O.S, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Hamzah, Andi, Surachman, RM, 2015, Pre-trial Justice & Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara,Jakarta, Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F, 2010, Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yusrisprudensi, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 2014, hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan, Jakarta, Sinar Grafika.
- Siahaan, Maruarar, 2011, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.
- Asosiasi Pengajar hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soedjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Soekanto,Soejono dan Mamuji, Sri, 1983, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Nur Dewata,Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- S.W. Sumardjono, Maria, 2014, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.
- 2001, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar, Cetakan Ketiga, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, Andi, 2015, Hukum Pidana Indonesia & Perkembangannya, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Jakarta, PT. Sofmedia.
- Jimly Asshidiqie, 2009, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi, dalam Satya Arinanto dan Nunik Triyanti,(ed), Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 222, dalam Bachtiar, 2015,

Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD”, Jakarta, Raih Asa Sukses.

Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty.

Gunther Teubner, 2012, Substantive and Reflexive Elements in Modern Law, Law and Social Review, Volume 17 Nomor 2. Dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Jakarta: Raja Grafindo.

Awaludin Marwan, 2010, Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum, Yogyakarta: Rangkang Education.

Ninik Suparni, dkk, 2014, Penerapan Hukum Progresif oleh Lembaga Kejaksaan dalam Kaitannya dengan penegakkan Hukum Pidana, Jakarta, Miswa.

Said Sampara, 1978, Dikutip dari buku Sudikno Mertokusomo, Pengantar Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, ;Permadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum, Bandung, Alumni.

Said Sampara, 1983, Dikutip dari buku Surojo Wignyodipuro, 1983, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Ikthtiar.

Philippe Nonet dan Philip Selznik, 2013, Hukum Responsif, Cetakan VII, Bandung, Nusa Media.

Tentang Fungsi Mahkamah Konstitusi, baca Jimly Asshidiqie, 2008, Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer.

Philippe Nonet dan Philip Selznik, 2013, Hukum Responsif, Cetakan VII, Bandung, Nusa Media.

Tentang Fungsi Mahkamah Konstitusi, baca Jimly Asshidiqie, 2008, Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer.

B. Peraturan Perundang- undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145).

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang.

C. Karya Ilmiah, Jurnal, Surat Kabar, Internet.

Nirwana Satriyadi, Irfan, 2016, Tesis, Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Putusan Praperadilan Penetapan Tersangka, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kilal Abidin, Muhammad, 2009, Tesis, Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 10/PID. PRAP/2008/PN.JKT.SEL Mengenai Permohonan Praperadilan PT. Inti Indosawit Subur Terhadap Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, Program Magister Hukum Bidang Hukum Bisnis dan Hukum Kenegaraan, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Afrizia Aditya Nandani, 2016, Tinjauan Yuridis atas Putusan Praperadilan dalam Perkara No. 04/ Pid. Prap/ 2015/Pn.Jkt.Sel. (Studi Kasus Putusan Praperadilan Untuk Tidak Sahnya Status Tersangka Budi Gunawan Atas Kasus Korupsi), Skripsi, Surabaya, Program Strata 1 Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya.

Academia Edu,1991, <http://www.academia.edu/10691642/>, diunduh 23 Juni 2015.; Esmi Warassih, Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis, Surabaya: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Novianti, Implikasi Hukum Putusan Praperadilan Penetapan Tersangka Budi Gunawan, Info Singkat Hukum, Vol. VII, No. 04/II/P3DI/Februari 2015.

Dwis Vimiar, Inge, Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11 No.3, September 2011.

Eddy O.S Hiariej, “Hal Ikhwal Praperadilan”,KOMPAS, 8 April 2015.

Satjipto Rahardjo, “Membedah Hukum Progresif”, Harian Kompas, Medio Oktober 2006.

Eddy O.S Hiariej, “Menyandera Dengan Status Tersangka”, <http://nasional.kompas.com/read/2015/01/21/14130431/Menyandera.dengan.status.tersangka>, diakses 19 Februari 2018.

Eddy O.S Hiariej, “Menakar Bukti Minimum”, <http://nasional.kompas.com/read/2012/07/02/03041542/Menakar.Bukti.Minimum>, diakses tanggal 20 Februari 2018.

Franklin D. Roosevelt, “The Four of Freedom”, <http://www.fdrfourfreedomspark.org/fdr-the-four-freedoms/>,

Damang Averroes Al-Khawarizmi, “Hukum Pidana Formil Dalam Hak Asasi Manusia”, <http://www.negarahukum.com/hukum/hukum-pidana-formil-dalam-hak-asasi-manusia.html>

Reda Manthovani, “Praperadilan, Tinjauan Yuridis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/beranda.beritamedia/Praperadilan,TinjauanJuridisPascaPutusanMahkamahKonstitusi>, diakses pada 20 Februari 2018.

Muhammad Isro; <https://www.google.co.id/amp/s/bungbens.wordpress.com/2010.04/22/upaya-hukum-terhadap-putusan-praperadilan/amp/>, diakses 22 Februari 2018.

Suhadi; M.hukumonline.com/berita/baca/lt54edeba8c481c/ma-sebut-peluang-kpk-ajukan-peninjauan-kembali, diakses 25 Februari 2018.

Bolmer Hutasoit, “Artikel Politik Hukum, tujuan hukum menurut Gustav Radbruch”, <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/>, diakses 2 November 2018.

Gayus Lumbuun, Hakim Agung; Putusan MK Terkait Praperadilan Bisa Dikalahkan Perma Ada tiga opsi yang bisa diambil oleh MA. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt556f932a4c372/hakim-agung-putusan-mk-terkait-praperadilan-bisa-dikalahkan-perma>, diakses 23 Februari 2018.

Supriyadi Widodo Eddyono, MA didesak Segera terbitkan Perma soal Penetapan Tersangka, <http://icjr.or.id/ma-didesak-segera-terbitkan-perma-soal-penetapan-tersangka/>, diakses 24 Februari 2018.

Alexander Frans, “Jaksa Dan Hakim Diadukan Ke KY Dan MARI Akibat Abaikan Putusan Pra Peradilan”, www.suaraflobamora.com/2017/05/03/jaksa-

dan-hakim-diadukan-ke-ky-dan-mari-abaikan-putusan-pra-peradilan/, diakses tanggal 11 Mei 2018.

Mahmud Mulyadi, “Ahli: Praperadilan Gugur Sejak Sidang Pokok Perkara di Buka Oleh Hakim”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/12/14104721/ahli-praperadilan-gugur-sejak-sidang-pokok-perkara-dibuka-oleh-hakim>, diakses tanggal 11 Mei 2018.

Muhammad Sholeh, “Hakim Gugurkan Praperadilan Mantan Perawat National Hospital”, <https://regional.kompas.com/read/2018/04/02/19354801/hakim-gugurkan-praperadilan-mantan-perawat-national-hospital>, diakses tanggal 12 Mei 2018.

Marcus Priyo Gunarto; “Polemik Perintah Penetapan Tersangka”, m.mediaindonesia.com/read/detail/155747-polemik-perintah-penetapan-tersangka, diakses pada tanggal 11 Mei 2018.

Amos Lafu, “Bebas Dari Korupsi, Kejaksaan Diminta Rehabilitasi Nama Baik Ahmad Maro”, <https://www.mahensaexpress.com/2018/09/13/bebas-dari-dakwaan-kejaksaan-diminta-rehabilitasi-nama-baik-ahmad-mar0-misteri-uang-500-juta/>, diakses tanggal 5 November 2018.

Asep N. Mulyana, “Salah Ketik Tak Membuat Surat Dakwaan Batal”, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4c5baeff55a93/salah-ketik-tak-membuat-surat-dakwaan-batal>, diakses tanggal 5 November 2018.

Mahfud MD, “Penegakkan Keadilan di Pengadilan”, http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=26&PH_PSESSID=lpqp110odneljp8kt240iflsj7, diakses tanggal 1 November 2018.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII//2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN/.JKT.SEL.

Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor.1/Pid.Prap/2017/PN.Kfm

Putusan Pengadilan Negeri Bantul, Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.Btl.



Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 133/Pid.Prap/2017/PN Jkt-Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Smn.